

ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI RTR KAWASAN PANTAI SELATAN TERPADU PROVINSI BANTEN

Isvan Taufik¹, Arlan Marzan², Japar³, Resti Meliana Sari⁴, Endang Kusnadi⁵

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten^{1,2,3,4}

Email: isvantaufik@bantenprov.go.id¹, arlanmarzan@bantenprov.go.id²,
japturbin@gmail.com³, restimeliana@bantenprov.go.id⁴ dan endang.kusnadi@bantenprov.go.id⁵

Abstrak

Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu di Provinsi Banten merupakan zona penting dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sosial-budaya. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan tata ruang kawasan tersebut dengan menyoroti peluang dan tantangan dalam implementasinya. Sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan, pariwisata, dan pertambangan, menjadikan kawasan ini sebagai pendorong pembangunan ekonomi regional. Namun, hambatan berupa infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta degradasi lingkungan masih menjadi tantangan utama. Upaya mitigasi bencana, seperti pengelolaan risiko tsunami dan abrasi pantai, membutuhkan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini menyarankan integrasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan mengatasi tantangan ini, RTR Pantai Selatan Terpadu dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sehingga menjadi model perencanaan berkelanjutan bagi kawasan lain di Indonesia.

Kata Kunci: Kawasan Strategis; Pantai Selatan Banten; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

The South Coast Integrated Strategic Provincial Area (Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu) in Banten Province is a critical zone with high potential for economic growth, environmental management, and cultural development. This study evaluates its spatial planning policies, highlighting opportunities and challenges in implementation. The area's abundant natural resources—fisheries, tourism, and mining—position it as a driver of regional economic development. However, obstacles such as inadequate infrastructure, limited public participation, and environmental degradation persist. Disaster mitigation efforts, including tsunami and coastal erosion risk management, require more effective implementation. This research suggests integrating sustainable environmental management with eco-friendly infrastructure development while enhancing community participation in spatial planning. By addressing these issues, the South Coast Integrated Spatial Plan can balance economic development with environmental preservation, creating a model of sustainable planning for other regions in Indonesia.

Keywords: Strategic Area; Banten Southern Coastal; Economic Development; Sustainable Development

PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan salah satu fokus utama perencanaan tata ruang, yang dirancang untuk mengoptimalkan manfaat ruang melalui pendekatan strategis berdasarkan potensi dan isu kawasan (Sorongan et al., 2022). KSP Pantai Selatan Terpadu, yang meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, adalah salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta pelestarian lingkungan hidup. Kawasan ini direncanakan berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, yang menekankan pentingnya pengelolaan ruang secara terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan lingkungan (Prabawasari et al., 2022).

Sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, KSP Pantai Selatan Terpadu menawarkan potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan industri pertambangan. Sumber daya ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial-budaya dan kelestarian lingkungan hidup (Irawati & Rif'an, 2020). Namun, pengembangan kawasan ini dihadapkan pada berbagai isu strategis, termasuk rendahnya optimalisasi potensi pariwisata, keterbatasan infrastruktur transportasi, dan tingginya risiko bencana alam seperti tsunami dan abrasi pantai. Untuk itu, diperlukan perencanaan ruang yang tidak hanya mengintegrasikan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Kultsum, 2023).

Landasan hukum penyusunan RTR KSP Pantai Selatan Terpadu merujuk pada berbagai peraturan nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023–2043. Kerangka hukum ini memberikan panduan dalam mengidentifikasi kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Selain itu, kawasan ini juga diatur sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan struktur dan pola ruang sebagai pedoman utama perencanaan wilayah.

Salah satu tujuan utama RTR KSP Pantai Selatan Terpadu adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang memadai, pelayanan sosial yang optimal, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Rencana ini mencakup pengembangan sektor perikanan berbasis teknologi, pengembangan kawasan wisata minat khusus, serta pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir (Binilang & P. J.C Franklin, 2018). Selain itu, perencanaan ini juga berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi, seperti reaktivasi jalur kereta api Saketi–Bayah dan pembangunan Bandar Udara Panimbang.

Namun, pengelolaan KSP Pantai Selatan Terpadu tidak terlepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, aktivitas industri dan pertambangan di kawasan ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lokal, seperti kerusakan lahan dan penurunan kualitas air (Aswin et al., 2023). Selain itu, potensi bencana alam, seperti tsunami dan abrasi pantai, menjadi ancaman serius yang memerlukan strategi mitigasi yang efektif. Oleh karena itu, RTR KSP ini menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap

perubahan iklim serta penyediaan sarana mitigasi bencana di kawasan pantai selatan (Fossey et al., 2020).

Kawasan ini juga memiliki keunikan dalam konteks sosial-budaya. Kehadiran masyarakat adat, seperti komunitas Baduy di Kabupaten Lebak, memberikan dimensi tambahan dalam perencanaan ruang. Pentingnya mempertahankan kawasan adat sebagai bagian dari identitas budaya lokal sejalan dengan tujuan RTR KSP untuk mempromosikan nilai-nilai sosial-budaya yang inklusif. Selain itu, pengembangan kawasan ini juga dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kesenjangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem.

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, RTR KSP Pantai Selatan Terpadu menetapkan beberapa prioritas utama, termasuk peningkatan aksesibilitas transportasi dan pengembangan jaringan energi (Korninos et al., 2019). Misalnya, pengembangan Pelabuhan Labuan dan Pelabuhan Bayah sebagai simpul transportasi laut akan memperkuat konektivitas kawasan ini dengan pusat-pusat ekonomi lainnya. Selain itu, proyek reaktivasi jalur kereta api Saketi–Bayah diharapkan mampu mendukung distribusi barang dan jasa dengan lebih efisien, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata (Schindler & Kanai, 2021).

Pengembangan kawasan wisata juga menjadi salah satu fokus utama RTR KSP Pantai Selatan Terpadu. Kawasan ini memiliki potensi besar dalam pariwisata berbasis alam, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, pantai-pantai di Lebak, dan destinasi wisata minat khusus lainnya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dikembangkan, terutama karena kurangnya infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisata. Untuk itu, RTR KSP ini mencakup rencana pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan kebijakan pelestarian lingkungan, guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak ekosistem yang ada.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan, penyusunan RTR KSP Pantai Selatan Terpadu menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Perencanaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang. Dengan pendekatan berbasis data dan kerangka hukum yang jelas, RTR KSP ini diharapkan mampu menjadi model perencanaan ruang yang efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan proses perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Selatan Terpadu. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menggali potensi, isu strategis, serta kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan tata ruang di kawasan tersebut. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek yang lebih kompleks terkait kebijakan ruang, sosial, dan ekonomi yang ada di kawasan perencanaan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang mendalam, dengan fokus pada Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu yang mencakup Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Studi kasus dipilih karena kawasan ini memiliki karakteristik unik dan kompleks, melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta menghadapi tantangan lingkungan yang serius seperti potensi bencana alam dan degradasi ekosistem. Melalui studi kasus ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi proses perencanaan ruang yang melibatkan aktor-aktor utama, kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pembangunan kawasan tersebut.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan perencanaan tata ruang KSP Pantai Selatan Terpadu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan ini, termasuk pejabat pemerintah daerah, perencana tata ruang, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel namun tetap terfokus pada topik-topik kunci seperti kebijakan tata ruang, strategi pembangunan ekonomi, serta mitigasi bencana. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan di beberapa titik penting di kawasan KSP Pantai Selatan Terpadu. Observasi ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi fisik kawasan, seperti kondisi infrastruktur, penggunaan lahan, serta permasalahan lingkungan yang ada. Observasi ini juga melibatkan pemetaan kawasan yang dilakukan dengan bantuan teknologi pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), untuk memetakan potensi, penggunaan lahan, dan kawasan yang rawan bencana.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen perencanaan yang relevan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP), serta laporan teknis terkait pembangunan infrastruktur dan mitigasi bencana yang ada di kawasan tersebut. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran mengenai kebijakan perencanaan yang diterapkan, potensi sumber daya alam, serta isu-isu yang menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan.

Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pola-pola yang ada dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata ruang KSP Pantai Selatan Terpadu. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut. Tema-tema ini dapat mencakup kebijakan tata ruang yang diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan, serta potensi dan isu strategis yang ada. Selain itu, dokumen-dokumen sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan analisis kebijakan, di mana kebijakan perencanaan ruang yang diterapkan di kawasan ini akan dibahas dan diinterpretasikan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan kawasan serta potensi pengembangannya. Dalam analisis ini, peneliti juga akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Evaluasi Kebijakan dan Strategi

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan KSP Pantai Selatan Terpadu. Untuk itu, evaluasi dilakukan terhadap kebijakan perencanaan ruang yang ada, termasuk strategi pengembangan infrastruktur, kebijakan pemanfaatan ruang, serta langkah-langkah mitigasi bencana yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan implementasi di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, peneliti juga akan mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini. Hal ini penting karena partisipasi aktif dari masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis mengenai peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan ruang dan pengelolaan kawasan.

Pendekatan Berbasis Pengelolaan Lingkungan

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengadopsi pendekatan berbasis pengelolaan lingkungan yang berfokus pada aspek keberlanjutan. Pendekatan ini sangat relevan mengingat kawasan KSP Pantai Selatan Terpadu berada di wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek ekonomi dan sosial dari perencanaan ruang, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebijakan yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

Keterbatasan Penelitian

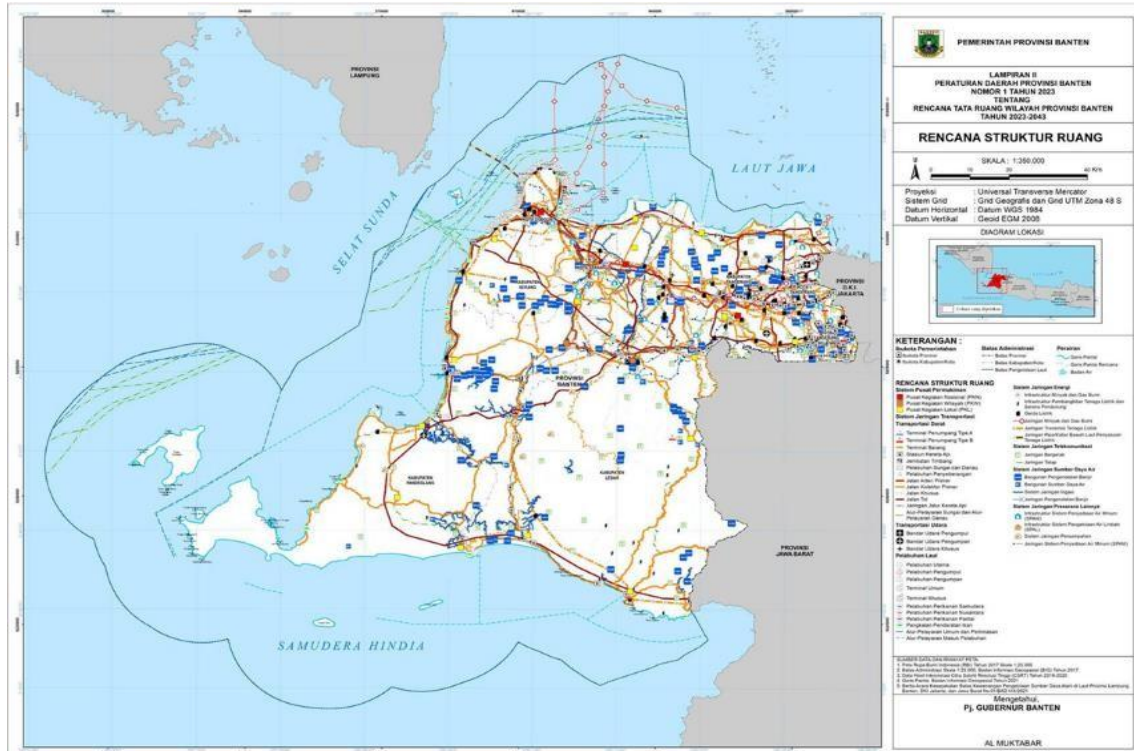
Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan pertama adalah aksesibilitas terhadap data dan informasi yang diperlukan, terutama terkait dengan kebijakan dan dokumen yang bersifat sensitif atau belum dipublikasikan secara luas. Selain itu, meskipun wawancara dengan pemangku kepentingan telah dilakukan, peneliti tidak dapat mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan pandangan dari semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan tata ruang di kawasan KSP Pantai Selatan Terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan tata ruang kawasan Pantai Selatan Terpadu di Provinsi Banten, yang mencakup Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Maesaroh et al., 2013). Kawasan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan, namun juga menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan ruang dan mitigasi bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) Pantai Selatan Terpadu telah mencakup banyak aspek penting, namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut (Mariane & Prasasti, 2023).

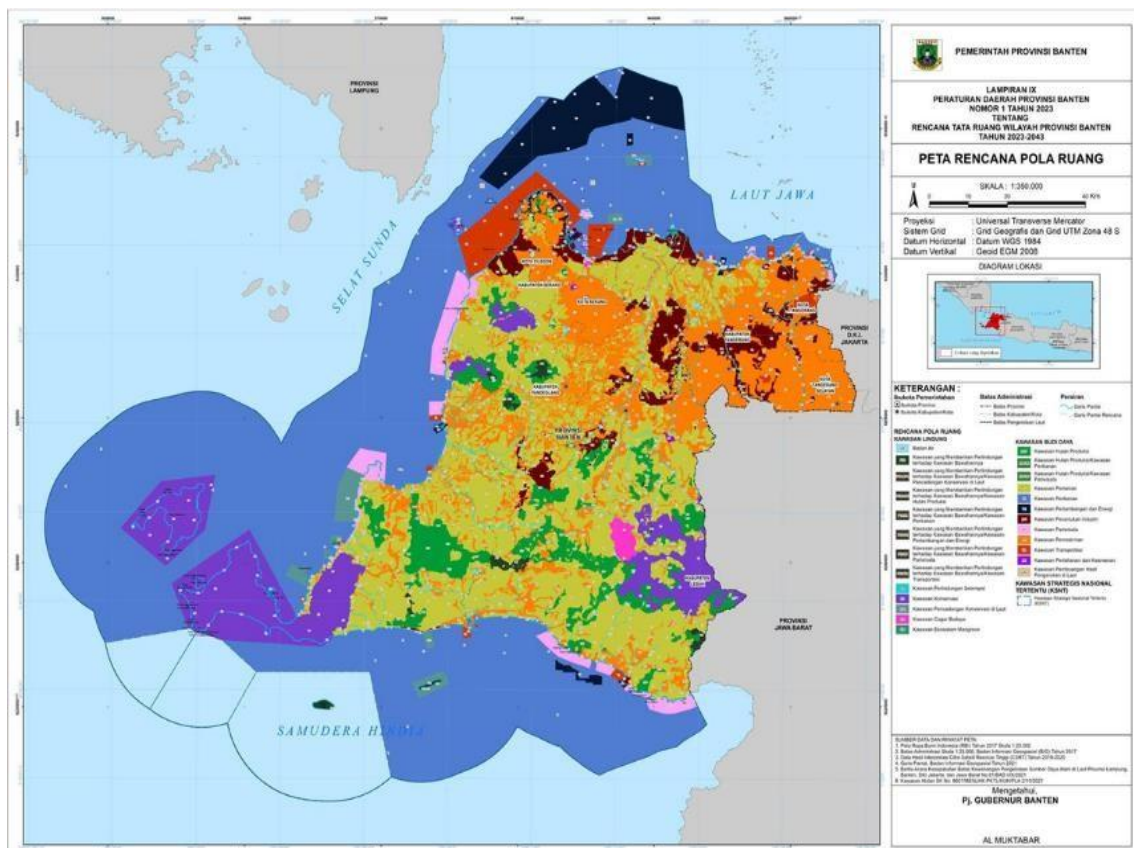
Kebijakan Tata Ruang dan Pengelolaan Kawasan

RTR KSP Pantai Selatan Terpadu dirancang berdasarkan berbagai kebijakan perencanaan yang melibatkan pendekatan sistematis dan terkoordinasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan dengan prioritas pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan dan pariwisata, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Banten. Namun, meskipun potensi ekonomi yang besar, implementasi kebijakan ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas kawasan ini.



Gambar 1.1 Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Banten

Gambar 1.1, yang menunjukkan Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Banten, mengilustrasikan pemetaan kawasan yang menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur, baik itu di sektor transportasi maupun sektor industri. Gambar ini menunjukkan bahwa wilayah Pantai Selatan Terpadu merupakan kawasan dengan potensi besar yang harus mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan fasilitas penghubung antar wilayah, terutama untuk meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan daerah lainnya di Provinsi Banten. Namun, meskipun infrastruktur jalan dan transportasi menjadi prioritas dalam rencana ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan dan fasilitas transportasi lainnya masih jauh dari harapan (Royanto et al., 2019). Salah satu temuan penting adalah rendahnya kualitas jalan di beberapa titik, yang menghambat akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan temuan dalam dokumen RTR KSP yang menyebutkan adanya kendala dalam pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor pariwisata dan sektor industri yang ada. Misalnya, pengembangan Bandara Udara Panimbang dan jalur kereta api yang diusulkan, seperti yang tercantum dalam gambar 1.2 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Banten, belum terlaksana secara maksimal.



Gambar 1.2 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Banten

Rencana Pengembangan dan Konsep Pengembangan KSP Pansela Terpadu Dalam perencanaan KSP Pantai Selatan Terpadu ini ada beberapa kegiatan yang menjadi potensi besar yang perlu dikembangkan, diantaranya:

1. Konektivitas Pusat-pusat Pelayanan

Konsep pengembangan konektivitas pusat-pusat pelayanan sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah dan perekonomian daerah. Pusat-pusat pelayanan, seperti pusat kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan, perlu terhubung dengan baik agar aksesibilitas masyarakat meningkat. Adapun infrastruktur pendukung dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan ini diantaranya jaringan transportasi, integrasi moda transportasi, kerjasama antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, pengembangan teknologi dan RTH.

2. Pengembangan Sektor Perikanan

Konsep pengembangan sector perikanan diantaranya Memfasilitasi pengembangan kegiatan agribisnis pada Kawasan Perikanan, dan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Agropolitan), Mendorong tumbuhnya kegiatan agrowisata di Kawasan Perikanan dan Agropolitan, Pengembangan dan peningkatan kegiatan perikanan melalui usaha mandiri masyarakat, Pengembangan dan peningkatan kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat, Memberikan pelatihan dan bimbingan secara berkala bagi masyarakat dalam pengembangan usaha, Pengembangan

industri pengolahan ikan, Menyiapkan prasarana pendukung sektor perikanan dan mengembangkan RTH.

3. Pengembangan Sektor Pertanian

Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan.

4. Pengembangan Sektor Industri

Kebijakan pengembangan kegiatan industri hijau terintegrasi ini dimaksudkan untuk memantapkan fungsi kawasan pada masa akan datang sebagai kawasan tumbuh cepat dan penciptaan iklim investasi yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan industri hijau terintegrasi adalah suatu pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengembangkan sektor industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan. Berikut unsur-unsur yang mendukung pengembangan kawasan industri hijau terintegrasi: Pengembangan kawasan peruntukan Industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif, Pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri termasuk jalan untuk konektivitas mobilitas industri, Pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial dan Setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri

5. Pengembangan Sektor Pertambangan

Di negara manapun pertambangan di anggap sebagai bisnis yang cukup prospektif dari sisi profit, namun di sisi lain juga men gancam lingkungan hidup. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbang kan dalam setiap pertambangan yaitu, pertama, lingkungan hidup, sebab lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem, yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Kedua, hak hukum masyarakat yang ada di sekitar pertambangan, sebab selain mereka memiliki hak dari segi lingkungan yang termanfaatkan, mereka juga terkena dampak dengan adanya eksploitasi baik dari segi hukum, sosial, dan budaya. Maka dalam pengembangan sektor pertambangan ini memuat: Mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pertambangan, Meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, Meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan Setiap kegiatan Pertambangan yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana.

6. Pengembangan Sektor Pariwisata

Community-Based Tourism (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah suatu pendekatan dalam industri pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat dari pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Isu lingkungan di kawasan Pantai Selatan Terpadu menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang, mengingat kawasan ini rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, dan abrasi pantai (Siti Nurbayani & Lingga Utami, 2019). Dalam hal ini, RTR KSP mencantumkan strategi mitigasi bencana yang melibatkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan tsunami, serta pemeliharaan kawasan pesisir yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan pelindung terhadap gelombang tinggi.

Pada Gambar 1.2 juga menampilkan rencana kawasan strategis yang perlu dilindungi, seperti kawasan pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat. Namun, meskipun telah ada rencana pengelolaan kawasan lindung, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih lemah di lapangan. Salah satu faktor yang menghambat adalah kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri di sekitar kawasan pesisir yang dapat merusak ekosistem, seperti polusi laut dan kerusakan terumbu karang. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang efektif untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, terutama di sektor pertambangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Perencanaan tata ruang yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTR KSP Pantai Selatan Terpadu masih sangat terbatas, terutama di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan lebih banyak berasal dari kalangan akademisi dan pejabat pemerintah, sementara kelompok masyarakat yang lebih luas, seperti nelayan dan petani, kurang diberdayakan dalam proses ini (Latif et al., 2019).

Penurunan kualitas partisipasi masyarakat ini menghambat penerimaan terhadap kebijakan perencanaan yang diterapkan, terutama yang berkaitan dengan alokasi ruang untuk kegiatan industri dan pertambangan. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan kawasan wisata. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang, serta penguatan mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan dan Strategi

Secara keseluruhan, kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam RTR KSP Pantai Selatan Terpadu telah mengakomodasi banyak aspek penting dalam perencanaan tata ruang, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan koordinasi antar sektor. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan yang belum optimal antara sektor ekonomi dan lingkungan. Sektor-sektor

seperti pariwisata dan perikanan memerlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada keberlanjutan. Selain itu, aspek mitigasi bencana perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Dalam hal ini, rekomendasi penelitian ini adalah agar RTR KSP Pantai Selatan Terpadu lebih menekankan pada integrasi antara sektor ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan. Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang ketat, dan keberlanjutan sektor pariwisata harus dijaga melalui kebijakan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat implementasi kebijakan yang ada dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) Pantai Selatan Terpadu memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sosial-budaya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, seperti sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan, yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Namun, implementasi kebijakan tata ruang masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk rendahnya kualitas infrastruktur, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Upaya mitigasi bencana, seperti penanganan risiko tsunami dan abrasi pantai, telah menjadi bagian penting dalam RTR KSP ini, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan ruang yang lebih adaptif. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Kebijakan tata ruang Pantai Selatan Terpadu perlu mengintegrasikan pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan dengan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan komunitas lokal untuk memastikan bahwa rencana tata ruang mencerminkan kebutuhan dan potensi kawasan secara holistik. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data, RTR KSP Pantai Selatan Terpadu dapat menjadi model perencanaan tata ruang yang efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiello, L. M., Joglekar, S., & Quercia, D. (2022). *Multidimensional tie strength and economic development*. *Scientific Reports*, 12(1), 22081. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26245-4>
- Aswin, H., Umar, U., & Haisah, S. (2023). Industri Pengolahan Sapi Terpadu Di Kabupaten Gorontalo Dengan Pendekatan Arsitektur Hijau. *Venustas*, 2(2), 46–54. <https://doi.org/10.37195/venustashome.v2i2.536>
- Binilang, R., & P. J.C Franklin, dan P. H. G. (2018). Pengembangan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Spasial*, 5(2), 141–149.
- Cao, H., Li, M., Qin, F., Xu, Y., Zhang, L., & Zhang, Z. (2022). Economic Development, Fiscal Ecological Compensation, and Ecological Environment Quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph19084725>

- Djakapermanan, R. D., & Hidayat, J. T. (2023). Kinerja Infrastruktur Pelayanan Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah Pengembangan Timur Kabupaten Bogor. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(4), 1345–1356. <https://doi.org/10.31004/jutin.v6i4.20787>
- Fossey, M., Angers, D., Bustany, C., Cudennec, C., Durand, P., Gascuel-Odoux, C., Jaffrezic, A., Pérès, G., Besse, C., & Walter, C. (2020). A Framework to Consider Soil Ecosystem Services in Territorial Planning. *Frontiers in Environmental Science*, 8(March), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00028>
- Grip, K., & Blomqvist, S. (2021). Marine spatial planning: Coordinating divergent marine interests. *Ambio*, 50(6), 1172–1183. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01471-0>
- Irawati, N., & Rif'an, A. A. (2020). Penataan Ruang Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Mitigasi Terhadap Bencana Kepesisiran. *Jurnal Penataan Ruang*, 15(2), 42. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v15i2.7268>
- Komninos, N., Kakderi, C., Panori, A., & Tsarchopoulos, P. (2019). Smart City Planning from an Evolutionary Perspective. *Journal of Urban Technology*, 26(2), 3–20. <https://doi.org/10.1080/10630732.2018.1485368>
- Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13–23. <https://doi.org/10.30598/jp16iss1pp13-23>
- Maesaroh, S., Barus, B., & Iman, L. (2013). Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 15, 45. <https://doi.org/10.29244/jitl.15.2.45-51>
- Prabawasari, V. W., Bahar, Y. N., Apriyanti, R., & Prakosa, W. (2022). Formulasi Perencanaan Terpadu Untuk Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Lesung. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.30998/lja.v5i1.12732>
- Rodríguez, Velastequí, M. (2019). IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW). VII(2), 1–23.
- Royanto., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman Di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(1), 34. <https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2925>
- Sajidin, M., Nurani, H., Litak, L., & Cahya, F. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim Indonesia. 4, 23–32.
- Siti Nurbayani, & Lingga Utami. (2019). Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.628>
- Sorongan, E. G., Karwur, D., & Kalangi, J. A. F. (2022). Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 18(2), 355–366. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i2.55170>
- Zheng, Y., Lin, Y., Zhao, L., Wu, T., Jin, D., & Li, Y. (2023). Spatial planning of urban communities via deep reinforcement learning. *Nature Computational Science*, 3(9), 748–762. <https://doi.org/10.1038/s43588-023-00503-5>